

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
GUSTAV RADBRUCH**

TESIS



**OLEH
MUH. BAHRUL ULUM
NIM. 22507009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
GUSTAV RADBRUCH**

TESIS

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri Kediri
untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan program Magister Hukum

OLEH

**MUH. BAHRUL ULUM
NIM. 22507009**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI
2024**

PERSETUJUAN

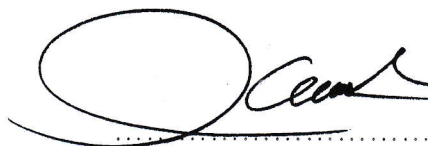
Tesis dengan judul *"PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH"* oleh Muh. Bahrul Ulum telah disetujui untuk diajukan pada Ujian Tesis Program Pascasarjana IAIN Kediri

Dosen Pembimbing

1. **Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum.**
NIP. 198003132011012004



2. **Dr. Ilham Tohari, M.HI.**
NIP. 197009042003121002



Kediri, Desember 2024

PENGESAHAN

Tesis ini Tesis dengan judul “*PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH*” oleh (Muh. Bahrul Ulum) telah diperbaiki sebagaimana mestinya dan dapat disahkan sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) Program Pascasarjana IAIN Kediri, pada tanggal Januari 2025

Tim Penguji

1. Dr. Ahmad Wahidi, M.H.I.
NIP. 197706052006041002

(Ketua Sidang)

2. Dr. H. Husnul Yaqin, S.H.I., M.H
NIP. 197608082006041003

(Penguji Utama)

3. Dr. Hj. Siti Nurhayati, S.H.I., M.Hum (Penguji 1)
NIP. 198003132011012004

4. Dr. H. Ilham Tohari, M.H.I
NIP. 197009042003121002

(Penguji 2)

Kediri, Januari 2025

Mengetahui

Direktur Pascasarjana IAIN Kediri



Prof. Dr. H. Moh. Asror Yusuf M. Ag.

NIP. 19750613200312100

MOTTO

“Adil ialah menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya” – Buya Hamka

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan taufik hidayah Alloh Suhanahu Wata'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamiin, karya yang sederhana ini kami persembahkan kepada:

1. Kedua Orang Tua dan Keluarga, Abah Fauzan, Mama Saripah dan Mbak Maghfirotul Khasanah yang penuh dengan kasih sayangnya mengantarkan saya dan memberikan doa serta dukungan demi selesainya pendidikan dan tugas akhir ini.
2. Dosen Pembimbing Tesis Ibu Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum dan Bapak Dr. H. Ilham Tohari, M.HI. yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan tesis ini.
3. Pengasuh Perjuangan Wahidiyah dan Pondok Pesantren Kedunglo Panjenengan Dalem Hadrotul Mukarrom Kanjeng Romo Kyai Abdul Majid Ali Fikri, R.A. yang telah memberikan doa restu mulai awal akan melanjutkan pendidikan hingga selesainya tugas akhir ini, semoga doa restu selalu dilimpahkan kepada kami.
4. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.
5. Keluarga Besar SMA Wahidiyah Kediri dan Madrasah Diniyah Takmiliah Wahidiyah yang telah memberikan dukungan doa dan semangat selama menyelesaikan tesis ini.
6. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022 yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atau dukungan kalian selama ini, semoga yang belum selesai segera selesai tesisnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Muh. Bahrul Ulum

NIM : 22507009

Program Studi : Pascasarjana Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM
KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN
GUSTAV RADBRUCH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat dari karya tulis orang lain.

Apabila dikemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kediri, Desember 2024
Yang Membuat Pernyataan



MUH. BAHRUL ULUM

ABSTRAK

MUH. BAHRUL ULUM, 2024, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum. 2. Dr. Ilham Tohari, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Peraturan, Status Perkawinan, Keadilan.

Pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang memberikan kepastian status hukum pasangan suami istri, anak-anak, serta akses terhadap layanan administrasi dan publik. Namun dengan adanya permendagri nomor 108 tahun 2019 tidak sinkron dengan aturan pencatatan perkawinan yang mengakibatkan ketidakadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum adanya aturan kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga dan mengkaji kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam kartu keluarga melalui perspektif teori keadilan Gustav Radbruch, yang menekankan keadilan.

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum normatif, yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan analisis. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan nonhukum yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*) kemudian, dianalisis dengan tujuan memecahkan masalah dan menggambarkan masalah lewat menghimpun data-data, kompilasi, serta analisis.

Akibat hukum yang ditimbulkan terkait Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap pencatatan pernikahan adalah tidak terlindungnya perempuan sebagai istri dikarenakan tidak diakunya sebuah perkawinan, tidak mendukung efektifitas hukum dikarenakan menimbulkan persoalan lain di tengah-tengah dinamika sosial masyarakat, dan status perkawinan tidak diakui oleh negara yang mengakibatkan tidak adanya perlindungan hukum jika terjadi sesuatu pada keluarga tersebut. Selain itu kebijakan status perkawinan belum tercatat dalam Kartu keluarga perspektif teori keadilan Gustav Radbruch tidak memenuhi nilai-nilai keadilan, karena tidak memenuhi aspek keselarasan, yaitu tidak selaras dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak adanya aspek keserasian yaitu tidak adanya keserasian antara hak dan kewajiban subjek hukum karena adanya persamaan hak perkawinan tercatat dan perkawinan belum tercatat, dan tidak adanya aspek keseimbangan atau keharmonisan karena tidak sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

MUH. BAHRUL ULUM, 2024, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Tentang Status Perkawinan Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Perspektif Teori Keadilan Gustav Radbruch*, Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Kediri, Dosen Pembimbing : 1. Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum. 2. Dr. Ilham Tohari, S.HI., M.HI.

Kata Kunci: Peraturan, Status Perkawinan, Keadilan.

Marriage registration is a legal obligation that provides certainty of legal status for married couples, children, and access to administrative services and public services. However, the existence of Permendagri number 108 of 2019 is not synchronized with the rules of marriage registration which results in injustice. This study aims to examine the legal consequences of the policy rules on the status of marriages that are not recorded in the family card and examine the policy on the status of marriages that are not recorded in the family card through the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice which emphasizes justice.

This research is included as normative legal research, which uses statutory and analytical approaches. To answer the formulation of problems in this study using primary legal materials, secondary legal materials and non-legal materials collected using library research techniques, then, analyzed with the aim of solving problems and describing problems through collecting data, compilation, and analysis.

The legal consequences arising from Regulation of the Minister of Home Affairs Number 108 of 2019 on marriage registration are that women are not protected as wives because a marriage is not recognized, does not support legal effectiveness because it creates other problems in the midst of the social dynamics of society, and marital status is not recognized by the state which results in no legal protection if something happens to the family. In addition, the policy of unregistered marital status in the family card from the perspective of Gustav Radbruch's theory of justice does not fulfill the values of justice, because it does not fulfill the aspect of harmony, which is not in harmony with the laws and regulations above it, namely Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 96 of 2018 concerning Requirements and Procedures for Population Registration and Civil Registration, There is no aspect of harmony, namely the absence of harmony between the rights and obligations of legal subjects because of the equal rights of registered marriages and unregistered marriages, and there is no aspect of balance or harmony because it is not in accordance with Article 2 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Article 4 of the Presidential Instruction of the Republic of Indonesia Number I of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian tesis dengan judul “PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT DALAM KARTU KELUARGA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH”

Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Magister Hukum Keluarga Islam pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Kediri.

Di dalam proses penulisan tesis ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Oleh karena itu, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Wahidul Anam, M. Ag selaku Rektor IAIN Kediri
2. Prof. Dr. Moh. Asror Yusuf, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Kediri
3. Ibu Dr. Siti Nurhayati, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1
4. Bapak Dr. H. Ilham Tohari, SH, M.HI selaku Dosen Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Kediri

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran beserta kritikan yang membangun sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Kediri, 12 Desember 2024

Muh. Bahrul Ulum

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
ABSTRAK.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu.....	10
F. Kajian Teoritis	14
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Pembahasan	40
I. Definisi Istilah	40
BAB II AKIBAT HUKUM YANG DITIMBULKAN TERKAIT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019 TERHADAP PENCATATAN PERKAWINAN.....	42
A. Dasar Dan Tujuan Penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil	42
B. Akibat Hukum Adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019	49
BAB III ANALISIS TEORI KEADILAN GUSTAV RADBRUCH TERHADAP PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 108 TAHUN 2019	60
A. Penggunaan Surat Pertanggung Jawaban Mutlak Perkawinan Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019	60
B. Analisis Teori Keadilan Gustav Radbruch Analisis Teori Keadilan Gustav Radbruch Terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019.....	72

BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	